



Berakhirnya perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur, ternyata tidak membawa manfaat yang diharapkan bagi banyak negara yang sedang berkembang, terutama yang memiliki keunggulan strategis dalam posisi geografi, sumber daya alam dan pasar yang potensial. Dunia setelah ditinggalkan Uni Soviet tiba-tiba dikuasai oleh AS sebagai negara adidaya tunggal yang secara leluasa memaksakan kehendaknya kepada negara-negara yang menjadi tujuan kepentingannya dengan menyebarkan momok hak azasi manusia, demokrasi dan pelestarian lingkungan hidup.

Negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, tetap saja menjadi sasaran (*target country*), tanpa ada pilihan yang lain. Sistem kehidupan dunia telah dikuasai AS dan negara-negara Eropa yang menjadi pendukung setianya sejak AS melindungi mereka dari kekalahan dalam PD II dan juga kemudian dalam perang dingin dari cengkeraman komunisme. Keunggulan ilmu, teknologi, riset dan engineering serta kekuatan modal yang dimiliki AS dan Eropa, membuat mereka mampu mengendalikan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan dunia. Apalagi hampir semua negara yang sedang berkembang bergantung pada mereka dalam peralatan militer.

Negara-negara berkembang tidak memiliki daya apa-apa dan banyak yang menyerah serta menari dan menyanyi mengikuti irama gendang yang ditabuh para penguasa dunia itu. Tetapi beberapa negara tidak mau tunduk dan memainkan kartunya dengan baik, seperti Cina, India, Korea Utara, Iran, Irak dan juga Malaysia, untuk menyebut beberapa contoh saja.

Mereka tidak takut karena mereka faham, bahwa perang pada hakekatnya bukan hanya adu kekuatan, tetapi juga adu kecerdasan. "*War is a game of deception*", kata Sun Tzu 2500 tahun yang lalu. Oleh karena itu sebagai negara yang diserang secara fisik dan non-fisik dari segala arah, sebagai negara yang

Menuju Politik Pertahanan Baru

Oleh: Wahyono S. K.



Politik dan Strategi Pertahanan Aktif

Sebagai pihak yang diserang kita harus siap menghadapinya. Setiap serangan musuh harus dihadapi oleh seluruh kekuatan nasional sebagai satu upaya nasional terpadu (*one integrated national effort*). Dari PD II kita dapat belajar bagaimana AS dan US dalam waktu singkat dapat mengerahkan seluruh kekuatan dan potensi nasionalnya untuk menghadapi serbuan Jerman dan Jepang. Juga dalam Perang Kemerdekaan menghadapi Belanda kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan potensi nasional yang kita miliki.

Agar seluruh kekuatan dan potensi nasional dapat dikerahkan sebagai satu upaya nasional terpadu, perlu ada satu strategi yang jelas yang dapat dipegang seluruh bangsa. Meskipun kita menjadi obyek serangan musuh, tidak berarti kita harus bersikap defensif. Perang darat memang membedakan antara pihak yang menyerang dan pihak yang diserang. Pihak yang diserang secara tradisional membangun infrastruktur pertahanan statis, seperti pembuatan benteng, penggalian parit atau perkuatan titik-titik tertentu, disertai sikap mental untuk menunggu serangan dan bertahan.

Perang laut sebenarnya tidak mengenal ofensif atau defensif, karena kedua pihak masing-masing berusaha menyerang lebih dulu, karena di laut praktis tidak ada tempat untuk bersembunyi atau bertahan. Baik

menjadi sasaran dari hampir semua negara besar, maka kita harus dapat mengembangkan sistem pertahanan yang kreatif dan proaktif, yang jeli melihat peluang untuk mengelakkan, membelokkan atau membalikkan serangan, atau jika mungkin bahkan memukul musuh di tempat yang tidak terduga. Tetapi jangan sekali-kali kita menyerah dan tunduk kepada kemauan mereka.

Hampir di semua forum dunia, termasuk PBB, Indonesia diperlakukan tidak adil. Dalam situasi lingkungan eksternal yang demikian tidak bersahabat, dan keadaan dalam negeri yang kacau balau akibat reformasi yang tidak terkendali dengan baik, bangsa Indonesia harus mampu merumuskan sikapnya yang baru sebagai jawaban terhadap tantangan jaman yang dihadapinya. Tulisan ini mencoba membahas dan mengusulkan gagasan politik pertahanan dan keamanan yang baru.



New Defence Policy

By: Wahyono S.K.

them to control the politics, economy, society and culture of the world as well as its security. This is reinforced by the dependency of almost all developing countries on them for military equipment.

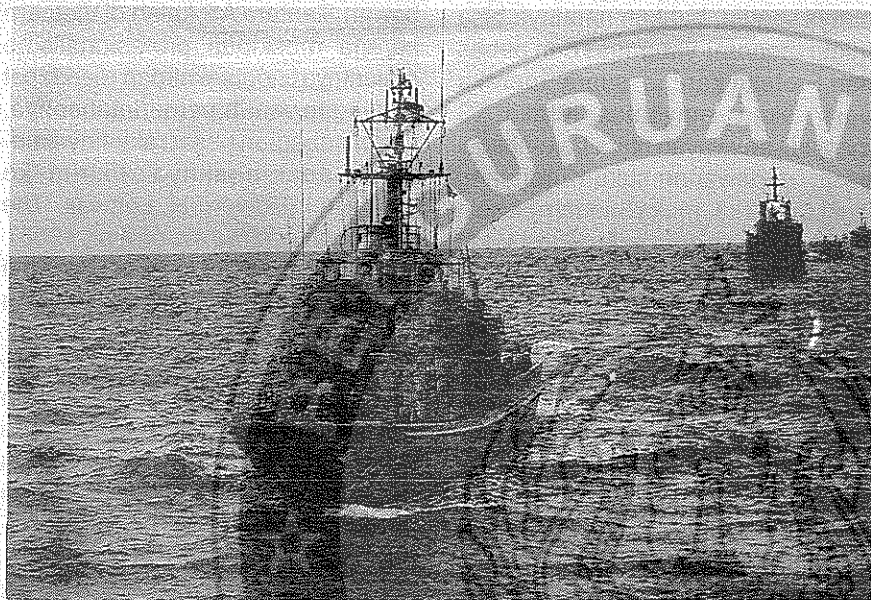
Developing countries have no power and many surrender and dance and sing to the tune beaten out by these controllers of the world. But some countries do not want to obey and play their cards effectively, like China, India, North Korea, Iran, Iraq and also Malaysia, to cite a few examples.

They are not afraid because they understand that war in its essence is not only a conflict of power, but also a conflict of intelligence. "War is a game of deception", said Sun Tzu 2500 years ago. Thus, as a country which is a target of almost all large countries, we must develop a creative and proactive defence system, which looks sharply at opportunities to scorn, divert or overturn attacks, or if possible even strike the enemy in unexpected places. But never let us surrender and obey their wishes.

In almost all world fora, including the United Nations, Indonesia is unjustly treated. In an external environment which is so unfriendly, and a domestic situation which is chaotic because of poorly controlled reform, the Indonesian people must draw up a new attitude as an answer to the challenges of the age which it faces. This writing tries to discuss and propose ideas for a new defence and security policy.

An active defence policy and strategy

We must be ready to face the attacks we are under. Every attack by the enemy must be faced by the whole force of the nation with an integrated national effort. From World War 2 we saw how the US and USSR were able in a very short time to direct all their power and national potential to resist the German and



Gatra

TNI - AL warship

The end of the Cold War between the Western and Eastern blocs has not brought the hoped for benefits for many developing countries, especially those strategically prominent for their geographic position, natural resources and potential market. The world after the Soviet Union has quickly been taken over by the US as the sole superpower, broadly imposing its will on countries which are the object of its interests through the spectre of human rights, democracy and environmental protection.

Developing countries, including Indonesia, are still target countries without a choice. The system of world life has been dominated by the US and European countries, which have

loyally supported the US since it protected them from defeat in World War 2 and later in the Cold War from the clutches of communism. The lead in science, research, technology and engineering as well as the investment strength of the US and Europe enables

The policy foundation of our defence needs a new basis, that in our defence we must hold the initiative, we must disturb the enemy with our offensives and not always be reactive.



pihak yang menyerang maupun pihak yang diserang masing-masing harus dapat menegakkan *command atau control of the sea*, perbedaannya hanya terletak pada tugas dan sasaran akhirnya. Pihak yang menyerang harus mampu memproyeksikan kekuatan daratnya ke pantai musuh, sedangkan pihak yang diserang harus dapat menggagalkan proyeksi kekuatan darat musuh.

Perbedaan yang lain terletak pada kekuatan armadanya. Pihak yang menyerang mengerahkan kekuatan armada tempur yang besar (*full fledge battle fleet*) sedangkan pihak yang diserang mengerahkan satuan-satuan armada kecil yang tersebar dan bersifat mobil (*feet in being*), yang akan memecah armada musuh dan menghancurkannya sedikit demi sedikit, seperti dilakukan armada Inggris yang lebih kecil di bawah pimpinan Admiral Torrington melawan armada Perancis yang lebih besar dan memenangkan pertempuran laut di tahun 1960. (Julian S. Corbett, *Some Principles of Maritime Strategy, 1918*).

Semangat perang laut senantiasa ofensif meskipun harus bertahan terhadap serangan musuh. Oleh karena itu sesuai tuntutan era reformasi dan kondisi lingkungan strategis kita, kita harus mengganti pola pikir dan sikap mental kontinental dengan pola pikir dan sikap mental maritim yang selalu proaktif. Landasan politik pertahanan kita perlu semangat yang baru, bahwa dalam bertahan kita harus tetap memegang inisiatif, kita harus membuat musuh repot dengan ofensif-ofensif kita dan bukan sebaliknya di mana kita harus selalu bersikap reaktif. Para pemimpin seperti Kim Il Sung dan Saddam Husein adalah tokoh-tokoh dunia yang mampu memainkan kartunya dengan baik. Demikian pula Sukarno dengan inisiatifnya menggelar Konferensi Asia-Afrika, menggalang kekuatan New Emerging Forces dan menyerukan PBB untuk To Build the World Anew, telah membuat negara-negara besar kalang kabut, padahal ongkosnya hanya 2 milyar dollar.

Bandingkan dengan hutang kita sekarang yang lebih dari 140 milyar dollar hanya untuk menjadi negara miskin yang dilecehkan seluruh dunia.

Misalnya, ini sekedar contoh, dalam menyelesaikan pengungsi Timtim, mengapa kita harus repot mencarikan tempat di Pulau Wetar atau Pulau Buru, mengapa tidak kita giring mereka itu masuk enklav Okusi dan selanjutnya biar di urus PBB. Di Okusi mereka berada di tanah airnya sendiri, bahkan nantinya bisa minta otonomi yang luas dan bebas dari Fretelin karena suara mereka pasti akan mayoritas. Ketika AS menjadikan wilayah utara Irak sebagai basis perlawanan suku Kurdi yang ingin merdeka, maka Saddam Husein menggiring semua suku Kurdi yang ada di wilayahnya ke utara dan berhasil meredam niat jahat AS itu. Pro-aktif, berani, kreatif dan inovatif adalah kunci politik pertahanan yang baik.

Dengan landasan politik pertahanan yang bebas dari tekanan dan ikatan dengan negara besar manapun serta pro-aktif dalam menjaga keutuhan dan martabat bangsa dan negara, kita merumuskan strategi pertahanan yang baru untuk 25 tahun mendatang, yaitu membangun kekuatan pertahanan yang mampu melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia dengan mengandalkan seluruh kekuatan dan potensi nasional, serta kerja sama yang erat dengan negara-negara tetangga yang bersahabat. Kekuatan pertahanan yang baru itu sekaligus dilandasi jiwa dan semangat maritim. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, kekuatan maritim senantiasa berjalan sejajar dengan kekuatan ekonomi. "The concept of sea power to a certain degree is identified with the concept of the economic power of the state" (Sergei G. Gorshkov, *The Sea Power of the State, 1980*). Bahkan negara-negara demokrasi Barat (Western democracies) yang sekarang ini (Eropa dan Amerika) menjadi besar karena mewarisi supremasi maritim (heirs of maritime supremacy). "It is the system of beliefs and of government associated

with supreme maritime power that has prevailed" (Peter Padfield, *Maritime Supremacy and the Opening of the Western Mind, 1999*).

Prajurit Profesional

Strategi militer tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus mendapat dukungan seluruh rakyat dan pemerintah serta dilaksanakan oleh para prajurit yang profesional dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah. Tentara AS kalah di Vietnam karena meskipun profesionalisme prajuritnya tinggi sekali dan mendapat dukungan penuh pemerintahannya, tetapi sebagian besar rakyatnya menolak anak-anaknya dikirim ke Vietnam. (Edward N. Luttwak, *The Pentagon and the Art of War, 1985*). Dimasa lalu TNI dapat menyelesaikan semua pemberontakan daerah dengan baik, meskipun ada campur tangan langsung CIA (badan intelijen AS) dalam PRRI/Permesta (Kenneth Conboy dan James Morrison, *Feet to the Fire CIA Covert Operations in Indonesia, 1957-1958, 1999*), karena rakyat dan pemerintah mendukungnya. Sebaliknya sekarang TNI tidak berdaya menghadapi kerusuhan di Aceh dan Maluku karena dukungan rakyat dan pemerintah setengah hati, meskipun profesionalisme TNI sebenarnya sudah jauh baik dibandingkan dengan masa lalu.

Ada tiga persyaratan pokok untuk dapat sebagai prajurit profesional, yaitu *pertama*, memiliki kesetiaan terhadap negara yang tidak diragukan, *kedua* memiliki disiplin yang tinggi, dan *ketiga*, mendapat pendidikan dan pelatihan yang baik. Kesetiaan terhadap negara menduduki peringkat yang teratas, karena keselamatan bangsa dan negara dipertaruhkan kepadanya, pada jiwa dan raganya. Kewajiban seperti itu tidak dituntut dari para pejabat sipil atau rakyat umum.

Kesetiaan tentara terhadap negara sifatnya mutlak, karena hampir semua pemberontakan terhadap negara di masa lalu terjadi akibat ada sejumlah kelompok tentara yang tidak setia terhadap negara, bahkan sekarang pun kerusuhan di Aceh dan



Japanese attacks. In the War of Independence against Holland we had to use all the power and national potential that we possessed.

So that all our power and national potential can be mobilised into one integrated national effort, there needs to be a clear strategy which can be adopted by the whole nation. Although we are the object of enemy attacks, this does not mean we must be defensive. Land war indeed differentiates between attackers and defenders. The defenders traditionally build static defence infrastructure, such as forts, trenches and strong points, and adopt a mental approach of waiting for an attack to defend from.

Sea war in fact does not know defence and offence, as both sides try to attack first, because at sea there is practically no place to hide or defend. Both the attacking and defending sides must enforce command or control of the sea, differing only in their jobs and targets. The attacking side must be able to project its land forces to the enemy coast, while the defending forces must be able to prevent the projection of the enemy land forces.

Another difference is in the strength of armadas. The attacking side uses a full fledged battle fleet, while the defending side uses small mobile and widespread fleet units (fleets in being), which will break up the enemy fleet and destroy it little by little, as was done by the smaller British fleet under Admiral Torrington in battle in 1690 against the larger French fleet.

The attitude for sea war is therefore offensive although it must resist enemy attack. Therefore according to the reform era and our strategic conditions, we must alter our mode of thought and attitude from a continental one to a maritime, constantly proactive, one. The policy foundation of our defence needs a new basis, that in our defence we must hold the initiative, we must disturb

the enemy with our offensives and not always be reactive. Leaders like Kim Il Sung and Saddam Hussein are world leaders who play their cards effectively. So was Sukarno with his initiative to arrange the Asia-Africa conference, founding the New Emerging Forces and urging the United Nations to build the world anew, making the big countries confused, although the cost was only two billion dollars. Compare this to our current debt which is more than 140 billion dollars just to become a poor country insulted by the whole world.

For example, in resolving the East Timorese refugee issue, why should we trouble ourselves seeking a place in Wetar or Buru islands instead of just herding them into the Oecussi enclave and letting the United Nations handle them? In Oecussi they would be in their own homeland, and later they could even request free and broad autonomy from Fretilin because their votes would be sure to be a majority. When the US turned northern Iraq into a base for Kurdish separatist opposition, Saddam Hussein herded all the Kurds in his area to the north and was able to block this evil American plan. Being proactive, bold, creative and innovative is the key to good defence policy.

With a defence policy foundation free from pressure and ties with big any big countries and proactive in maintaining the integrity and honour of our state and nation, we can draw up a new strategy of defence for the coming twenty five years, building a defence force which can protect the whole nation and land of Indonesia by exploiting all our national strength and power, and working closely with neighbouring allies. This new defence force must be founded on a maritime spirit and approach. As history has shown, maritime power is later matched by economic power. "The concept of sea power to a certain degree is identified with the concept of the economic power of the state". Even the Western democracies of Europe and America became great

because they were heirs of maritime supremacy. "It is the system of beliefs and of government associated with supreme maritime power that has prevailed".

Professional troops

Military strategy cannot be built by itself, but it must be supported by the whole people and government and carried out by professional troops from the highest to the lowest levels. US troops in Vietnam lost because although they had high professionalism and full support from their government, many Americans rejected the sending of their children to Vietnam. In the past, Indonesia's armed forces were able to settle all regional rebellions effectively, despite the direct involvement of the CIA (US Central Intelligence Agency) in the PRRI/Permesta rebellions, because the government and people supported them. But TNI is now unable to deal with riots in Aceh and Maluku because the support of the government and people is half-hearted, although in fact TNI's level of professionalism is much higher than in the past.

There are three basic conditions for professional troops, which are: first, unquestioned loyalty to the state; second, high discipline; third, good education and training. Loyalty to the state is the most important of these, as the safety of the nation and state depends on them, on their life and soul. This duty is not asked of civil officials or the general public.

Loyalty of soldiers to the state is indispensable, because almost all rebellions against the state in the past happened because some group of soldiers was disloyal to the state, and even now the Aceh and Maluku problems cannot be solved because there is a group of soldiers supplying weapons to or supporting one of the sides in conflict. Every soldier must put first the interests of the state and uphold the true values of the state.

The second condition for professional troops is discipline. The



Maluku belum dapat diselesaikan karena ada kelompok tentara yang mensuplai senjata atau berpihak pada salah satu kelompok yang bertikai. Setiap prajurit harus senantiasa mendahulukan kepentingan negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai hakiki bangsa (L.B. Moerdani, *menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, 1992).

Syarat kedua bagi profesionalisme prajurit adalah disiplin. Angkatan bersenjata adalah sebuah organisasi yang disiapkan untuk sewaktu-waktu dapat menghadapi ancaman terhadap bangsa kapan pun dan dibagian manapun dari negara. Oleh karena itu angkatan bersenjata harus solid, organisasinya ringkas, mobilitasnya tinggi dan para prajuritnya mempunyai disiplin, dedikasi dan *esprit de corps* yang tinggi, "once a force is in action its affairs must be under highly centralised directions and individuals must conform to high standards of discipline The fighting element of an effective army, navy or air force is a body of men with a highly developed corporate spirit and with a tradition of physical and mental discipline." (John Downey, *Management in the Armed Forces*, 1977).

Disiplin dalam tentara bukan disiplin mati. Setiap keputusan komandan dari yang teratas sampai yang terbawah, diambil setelah mendengar pertimbangan staf atau pembantu masing-masing, yang dalam proses pembahasan bebas mengeluarkan pendapat masing-masing, tetapi kemudian semuanya taat terhadap keputusan komandan. Setiap prajurit tunduk kepada hukum disiplin tentara, yang definisi pelanggaran disiplinnya sangat luas, yaitu "segala sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan tentara" (lihat PDT/Peraturan Disiplin Tentara dan KUHD/Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara). Pelanggaran disiplin itu dapat berupa melawan atasan atau pembangkangan terhadap perintah atasan, sampai kepada hal yang kecil-kecil seperti tidak rapi dalam berpakaian, seperti memakai topi yang tidak sesuai

ketentuan (topi golf) atau berambut panjang dan berpakaian seperti gerombolan bersenjata meskipun di daerah-daerah operasi.

Tentara yang tidak berdisiplin, yang tidak taat terhadap atasannya, yang dendam terhadap keputusan atasannya, sangat berbahaya bagi kehidupan tentara dan bahkan keutuhan negara, seperti ditunjukkan oleh hampir semua perwira yang bergabung dalam PRRI/Permesta (Kenneth Conboy dan James Morrison, *op cit*, 1999). Beberapa pakar kita yang mengaku pengamat militer menyikapi arus reformasi sekarang dengan mengusulkan agar para perwira menghapus hirarki dan membangun *network* masing-masing. Usul yang demikian dapat berakibat fatal bagi keutuhan angkatan bersenjata dan negara. Norma-norma sipil tidak selamanya dapat diberlakukan di lingkungan tentara, "the norms of civilian society do not constitute a superior moral system that soldiers must be made to share." Disiplin yang diberlakukan di lingkungan tentara memang tidak dikenal di masyarakat sipil, "discipline - a state of mind which leads to willingness to obey an order no matter how unpleasant or dangerous ... is not a characteristic of a civilian community." (Mark J. Osiel, *Obeying Orders*, 1999).

Syarat ketiga bagi terciptanya profesionalisme prajurit adalah pendidikan dan pelatihan yang baik. Pendidikan dan pelatihan militer secara normatif harus berstandar internasional, karena tentara disiapkan untuk menghadapi musuh dari luar. Hampir semua negara berusaha agar kualifikasi pengetahuan dan keterampilan para prajuritnya tidak lebih rendah dari negara-negara tetangganya, bahkan kalau mungkin melebihi.

Sesungguhnya tingkat pendidikan dan pelatihan militer kita sudah cukup baik, terbukti dari kinerjanya yang tidak pernah mengecewakan dalam penugasan-penugasan internasional, baik dalam kontingen-kontingen gabungan Garuda, beberapa kali pelayaran keliling dunia KRI Dewaruci maupun tim akrobatik Elang

Biru. Namun demikian mutunya sekarang ini sulit dipertahankan karena dukungan anggaran belanja pertahanan yang selalu di bawah 1,5% GNP, sedangkan negara-negara tetangga mendapat minimal 3% GNP (lihat *Defence Almanac atau Military Balance* selama 30 tahun terakhir).

Hambatan yang lain adalah sikap beberapa perwira tinggi yang tidak mendukung peningkatan mutu akademik pendidikan pembentukan perwira setara S-1 dan pendidikan pembentukan bintang setara D-1, padahal Angkatan Laut dan Angkatan Udara sudah siap untuk melaksanakannya sejak awal tahun 1980-an. Mereka tidak melihat bahwa pendidikan pembentukan perwira di negara-negara maju seperti di AS, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia dan Jepang sudah lama setara S-1. Setidaknya ada tiga macam kesarjaan yang dapat diberikan kepada alumni pendidikan pembentukan perwira, yaitu Sarjana Ilmu Militer (SIM), Sarjana Teknik Militer (STM) dan Sarjana Manajemen Militer (SMM).

Penyetaraan tingkat akademik akan memudahkan para perwira dan bintang untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi di dalam dan diluar negeri, seperti S-2 dan S-3 untuk bidang-bidang studi strategik, keamanan nasional, pertahanan, perang atau manajemen dan enjinering bagi perwira, serta D-2 dan D-3 sesuai jurusannya untuk bintang, sehingga akhirnya kualitas akademik mereka dan khususnya ilmu militernya berkembang dan kualitasnya kinerjanya pun meningkat.

Lembaga-lembaga pendidikan militer harus terbuka bagi masyarakat sipil. Pendidikan tingkat staf dan komando harus dapat diikuti oleh para pejabat sipil dari golongan yang sesuai dengan kepangkatan peserta militer serta mempunyai kaitan kerja langsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak analis masalah militer dan bahkan penulis masalah strategi militer adalah kalangan sipil, hanya saja yang di luar negeri umumnya mereka sudah pernah menjalani wajib militer atau bahkan veteran perang.



armed forces must be an organisation ready to face challenges to the nation at any time in any place. Thus, the armed forces must be solid, with a tight organisation, high mobility and well-disciplined soldiers with high dedication and esprit de corps. "Once a force is in action its affairs must be under centralised directions and its individuals must conform to high standards of discipline... the fighting heart of an effective army, navy or air force is body of men with a highly developed corporate spirit and with a tradition of physical and mental discipline."

Discipline among troops is not dead discipline. Every command decision from the top level downwards, is taken after consulting staff and assistants, but later everyone follows the orders of the commander. Every troop obeys law of military discipline, which has wide definitions of disciplinary breaches: "anything which may not happen in the lives of soldiers" (see Rules of Military Discipline and Compendium of Laws on Military Discipline). These breaches of discipline may be disobeying a command, opposing one's superiors to little things like untidy dress. Troops with low discipline can be seen from their style of dress, such as wearing the wrong hat (golf

hats) having long hair or dressing like an armed gang even in operations areas.

Undisciplined troops, who do not obey their superiors, who neglect their superiors' decisions are very dangerous for the lives of soldiers and even for the integrity of the nation, as shown by almost all the officers involved in the PRR/ Permesta rebellions. Some of our military experts see the current reform wave by proposing that officers abandon hierarchy and build various networks. Such a proposal could be fatal for the integrity of the armed forces and the country. Civilian norms cannot be applied in the military domain. "The norms of civilian society do not constitute a superior moral system that soldiers must be made to share." The discipline of the military field is indeed unknown among civilians. "Discipline- a state of mind which leads to a willingness to obey an order no matter how unpleasant or dangerous. is not a characteristic of a civilian community."

The third condition for the creation of professional soldiers is good education and training. Education and military training should be of international standard, as soldiers are prepared to face an outside enemy. Almost all countries aspire to a level

of qualification, knowledge and skill for their troops equal to those of neighbouring countries or if possible higher.

Truly the level of education and training of our troops is quite good already, as proved by their satisfactory performance in international assignments, both in the Garuda contingents, the Dewaruci sailors who have circumnavigated the world several times and the Blue Eagle acrobatic team. But the quality now is hard to maintain because the defence budget is always below 1.5% of GNP, while in neighbouring countries it is at least 3% of GNP.

Another obstacle is the attitude of some senior officers who do not support an increase in the academic quality of forming officers to degree level and that of sergeants to diploma school level, although the Navy and Air Force were ready to do this from the early 1980s. They do not see that education for officer formation in developed countries like the US, Canada, France, Germany, Russia and Japan has been a first degree for a long time. There are at least three degree courses which can be taken by graduates of officers school: Military Science, Military Techniques and Military Management.

An equal academic level will make it easier for officers and sergeants to seek better knowledge at home and abroad, such as second and third degrees for areas of strategic

Furthermore, as a nation targeted by interests of major countries, Indonesia needs to develop a strong counter intelligence capacity whereby to able to act against covert intelligence operations.



Gatra

To deal with riots in Aceh



Sistem dan Organisasi Pertahanan Negara

Penyelenggaraan pertahanan negara tidak sekedar merupakan upaya nasional terpadu, tetapi juga tersusun secara jelas, sehingga semua pihak tahu tempat dan fungsi masing-masing. Dikatakan terpadu karena semua gerakan unsur, baik vertikal maupun horisontal, menuju ke satu tujuan yang telah ditetapkan dalam politik dan strategi pertahanan negara.

Sistem pertahanan negara bersifat terbuka dan modular, terbuka dalam arti memberi akses yang luas bagi keikut-sertaan seluruh kekuatan dan potensi nasional, serta modular dalam arti mampu secara cepat, memperbesar atau memperkecil kekuatan dan kemampuan sesuai kebutuhan untuk menghadapi ancaman, disamping tiap-tiap sub-sistemnya mampu berdiri sendiri dalam hal hubungan dengan pusat terputus. Sistem pertahanan negara di satu sisi harus dapat menjamin dilaksanakannya keputusan-keputusan politik nasional tingkat tinggi oleh para prajurit di garis depan medan pertempuran, sedangkan disisi yang lain juga menjamin terselenggaranya pengerahan seluruh kekuatan dan potensi nasional ke garis depan medan pertempuran. "The purpose of the system as a whole is directed towards the man in the front line in order to motivate him, train him, equip him, supply and to direct his actions". (John Downey, *op. cit.*, 1977).

Organisasi pertahanan negara dibagi dalam tiga kelompok besar, yaitu kelompok pengambil keputusan tingkat tinggi, kelompok penyelenggara administrasi dan kelompok pelaksana operasi-operasi pertahanan negara. Kelompok pengambil keputusan tingkat tinggi menetapkan politik dan strategi pertahanan negara yang di jaman modern ini dilaksanakan oleh sebuah Dewan yang terdiri atas Presiden sebagai Ketua, dan beranggotakan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata dan para Kepala Staf

Angkatan.

Penyelenggara administrasi pertahanan negara adalah Departemen Pertahanan dan ketiga Angkatan, Darat, Laut dan Udara. Administrasi pertahanan negara meliputi personil, material, dokumen dan hukum militer. Administrasi personil meliputi pengerahan tenaga, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier, pembekalan dan perawatannya. Administrasi material meliputi pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusiannya. Administrasi dokumen meliputi penyediaan dokumen pengatur, penyimpanan, pendistribusian dan pemutakhirannya. Administrasi hukum militer dan humaniter meliputi penegakan dan pemutakhirannya. Kesemua kegiatan administrasi tersebut didukung oleh pusat informasi dan fasilitas penelitian dan pengembangan yang memadai.

Penyelenggaraan operasi-operasi pertahanan negara meliputi penetapan medan dan pembagian wilayah pertahanan negara, penyiagaan kekuatan dan kemampuan unsur-unsur operasional, penyiapan rencana tindakan dalam menghadapi berbagai keadaan darurat (*contingency plan*), perencanaan kebutuhan kekuatan dan kemampuan, perencanaan operasi-operasi militer, penugasan unsur-unsur operasional, pengendalian operasi-operasi militer, pelaksanaan dukungan logistik operasi dan penyediaan informasi intelijen. Perencanaan dan pengendalian operasi-operasi militer dilaksanakan oleh Markas Besar Gabungan dengan staf-staf umum gabungan, mengingat hampir semua operasi militer sekarang ini dan yang akan datang bersifat gabungan. Pembagian medan dan wilayah pertahanan disesuaikan dengan konsep geopolitik dan geostrategi negara yang bersangkutan, dengan memperhatikan ancaman yang dihadapi, demikian pula penetapan unsur-unsur operasionalnya.

Penyediaan informasi intelijen diselenggarakan oleh sebuah badan intelijen gabungan untuk yang bersifat strategis, dan badan-badan intelijen Angkatan yang bersifat teknis dan taktis. Sesuai perkembangan tekno-

logi, maka kemampuan intelijen elektronik memerlukan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh serta ditujukan terhadap negara-negara yang potensial dapat menjadi musuh, seperti yang dilakukan Australia dibantu Inggris dan Amerika Serikat terhadap Indonesia, meskipun Indonesia tidak pernah berniat memusuhi mereka. (Desmond Ball dan Hamish Mc Donald, *Death in Balibo Lies in Canberra*, 2000). Disamping itu sebagai negara yang menjadi sasaran kepentingan negara-negara besar, maka kemampuan kontra intelijen sangat dibutuhkan untuk melawan operasi-operasi intelijen tertutup (*covert intelligent operations*) mereka di sini.

Penyelenggaraan logistik dipisahkan atas penyediaan peralatan dan pembekalan serta pelaksanaan dukungan, yang pertama dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan bersama ketiga Angkatan, sedangkan yang kedua oleh Markas Besar Gabungan sebagai penyelenggara operasi-operasi pertahanan negara. Pemisahan penyelenggaraan dukungan logistik ini akan membebaskan Markas Besar Gabungan dari urusan-urusan administrasi, sehingga dapat memusatkan perhatian kepada masalah-masalah operasi pertahanan negara dan sekaligus meningkatkan profesionalismenya sebagai aparat militer yang bertaraf internasional.

Departemen Pertahanan, Markas Besar Gabungan dan Angkatan diibaratkan ketiga sudut segitiga sama sisi, terpisah tapi saling terhubung pada jarak yang sama, sehingga merupakan satu struktur bangunan yang kokoh. Dewan Pertahanan berada di titik berat segitiga itu yang juga terhubung dengan erat pula dengan ketiga sudut segitiga itu, sehingga dapat melakukan pengawasan dan pengendalian atas ketiganya. Segitiga itu sendiri merupakan satu sub-sistem dari keseluruhan sistem pertahanan negara yang melibatkan seluruh kekuatan dan potensi nasional. Disain sistemnya disesuaikan dengan politik pertahanan yang ditetapkan, sehingga dapat diubah dari waktu ke waktu.



studies, national security, defence, war, management and engineering for officers, or second and third diplomas for sergeants, so that their academic quality and their military science will develop and the quality of their performance will improve.

Military training institutions must open themselves to civilians. Training through to staff and Commando level must be available to civil authorities and agents in line with military rank and interfacing duties linked to that rank. It can not be denied that numerous writers and analysts of military affairs, and even those who write about military strategy, come from civilian ranks. The difference overseas is that most of these writers have had experience of compulsory military service or are war veterans.

National Defense Systems and Management

Defense of the state is more than an integrated national initiative, it is also clearly structured whereby all components are aware of their role and function. We say integrated because all elements whether vertical or horizontal work to a common purpose that has been fixed politically through national defense strategies.

The national defense system is open and modular; open in the sense that all national resources have wide access to participative support and modular in the sense that it can rapidly expand or contract in response to any threat and ensuring each individual sub-unit has the capacity to stand independently if contact with headquarters should be broken. The defense system must be able, on one hand, to ensure enforcement of national political decisions by soldiers on the front line while also being able to ensure that all national resources and potentials can be deployed to support efforts on that front line. "The purpose of the system as a whole is directed towards the man on the front line to motivate him, train him, supply him, and to direct his actions." (John

Downey, 1977)

The national defense organization is divided into three major groups; high level decision makers, the administrative sector and the operational agents who undertake action on behalf of national defense. The decision-making group establishes the policies and strategies for national defense; a group that in the modern era usually involves a "Council" over which the President presides with membership including the Vice President, Foreign Affairs Minister, Defense Minister, Military Commander and Heads of Services.

Defense administration is in the hands of the Department of Defense and the military corps; the army, navy and airforce. This administration involves matters of personnel, supplies, documentation and military law. Personnel administration involves manpower deployment, education and training, career guidance, backup and support. Supply administration involves sourcing, storing, maintenance and distribution. Documentation involves the supply of administrative documents, their filing, distribution and constant upgrading. Military law administration involved its application constant upgrading. All administrative work were backed by an information center and appropriate research and development facilities.

Operation matters included establishing a field of action and to arrange the distribution of regions of national defense, the preparation of strike and operational forces, the preparation of numerous contingency plans, planning of strike requirements, military and operational units, control of military elements and military intelligence. Planning and control of military operations fall under the Joint Chief of Staff Head Quarters (Markas Besar Gabungan) where joint general staff are used in recognition that nearly all military ops are now joint ones. Distributing the fields and regions of defense takes into account

national geo-strategic and geo-political elements involved, along with the threat being confronted and choice of operational elements.

Intelligence is provided by a strategic joint intelligence network backed by the intelligence units of each individual corps who can provide technical and tactical details. In line with technological advances, an electronic intelligence capacity holds high priority for following nations with a capacity to become enemies; the kind of surveillance that Australia, backed by England and the USA, brought to bear on Indonesia, even though Indonesia never held any ambitions to become their enemy (Desmond Ball and Hamish McDonald "Death in Balibo, Lies in Canberra" 2000). Furthermore, as a nation targeted by interests of major countries, Indonesia needs to develop a strong counter intelligence capacity whereby to able to act against covert intelligence operations.

Logistics work is split between supply of equipment and supplies and the backing up of these. The first is under the care of the Ministry of Defense in conjunction with the three service corps, while the latter is under the Joint Command HQ as the main actor in the field of national defense initiatives. This division relieves HQ from the demands of administrative matters and enhances its professionalism as an international standard military.

The Ministry of Defense, The Joint HQ and the Corps are like the three sides of a single triangle, separate but interconnected at regular points whereby to form a solid structure. The Security Council (Dewan Pertahanan) lies at the apex of the triangle strategically poised to control or monitor any part of the triangle. This triangle is a subsystem of the overall national resilience and defense system of the country that draws from all national resources. The structure is kept adjustable to accommodate movements in the politics of defense.